ISLAM INDONESIA DALAM KACAMATA TIBI

Bambang Q-Anees

Dari buku Bassam Tibi, *Islamism and Islam* kita menemukan penggaris keras binerisme ihwal Islam dan Islamisme. Pada kata pengantar buku ini, Bassam Tibi langsung menyatakan bahwa Islam adalah "keyakinan" dan Islamisme merupakan "kategori politik keagamaan". Keduanya berbeda, bahkan saling berseberangan. Lebih dari itu Islamisme bukanlah bagian dari Islam. Islamisme lebih merupakan tafsir politis atas Islam, terutama karena dasar Islamisme adalah penerapan ideologis atas agama di ranah politik[1]. Tibi menekankan bahwa Islamisme "bukanlah warisan Islam tetapi merupakan interpretasi politik kontemporer atas Islam yang didasarkan pada penciptaan tradisi."[2]

Islamisme disebut Tibi sebagai politik yang diagamakan (*religionized politics*) atau penawaran tatanan politik tertentu yang diyakini sebagai kehendak Allah. Ini sejenis ideology politik, bukan lagi sebagai agama. Contoh yang paling kuat gejala ini adalah *global phenomenon of religious fundamentalism*[3]. Contoh lain adalah pernyataan

Tibi kemudian mengemukakan enam ciri utama dengan ideologi Islamisme. *Pertama*, interpretasi atas Islam sebagai *nizam Islami:* Islam adalah *din-wa-daulah*: agama bersatu dengan negara. Bagi Tibi ciri ini adalah jantung utama islamisme. Jika ide mengenai negara Islam ini belum ditinggalkan, maka orang belum bisa berbicara banyak tentang masyarakat "Pos-Islamisme."[4] *Kedua*, Yahudi sebagai musuh utama yang akan menghancurkan umat Islam. *Ketiga*, demokratisasi dan posisi Islamisme institusional dalam sebuah negara demokratis[5]. *Keempat*, evolusi jihad tradisional menuju jihadisme[6]. *Kelima*, syariatisasi negara[7]. "...*classical shari'a has been developed into the idea of shari'atization of the state.*"[8] Kalangan Islamisme menafsirkan teks al-Qur'an untuk mendukung ide politik yang telah diagamakan. *Keenam*, kelompok Islamis sangat terobsesi untuk mengajukan soal kemurnian sebagai klaim atas autentisitas[9].

Bagaimana dengan Islam Indonesia? Islamisme atau Islam?

*

Islamisme dalam pandangan Tibi berkisar pada gagasan Negara Islam, permusuhan terhadap Yahudi, posisi Islam di Negara demokratis, jihadisme, syariatisasi Negara, dan pemurnian sebagai klaim keautentikan. Keenam ciri Islamisme ini semakin hari semakin nampak

---

[1] Bassam Tibi, *Islam dan Islamisme*, (Bandung: Mizan, 2016), hlm. 1.

[2] Bassam Tibi, *Islam dan Islamisme*, hlm. 302.

[3] Bassam Tibi, *Islamism and Islam*, (Yale University Press, 2012), hlm. 1.

[4] Gagasan tentang Pos-Islamisme akan dielaborasi di bagian berikut. Perspektif Tibi tentang masyarakat yang masih memimpikan "negara Islam" serta pos-Islamisme yang berarti kondisi dimana sebuah masyarakat telah menanggalkan ide negara Islam, akan dijadikan sebagai takaran untuk didiskusikan dengan sumber-sumber lainnya, terutama karya Asef Bayat.

[5] Bassam Tibi, *Islam dan Islamisme*, Bab IV.

[6] Bassam Tibi, *Islam dan Islamisme*, Bab V.

[7] Bassam Tibi, *Islam dan Islamisme*, Bab VI.

[8] Bassam Tibi, *Islamism and Islam*, hlm. 175.

[9] Bassam Tibi, *Islam dan Islamisme*, Bab VII.

ada dan berkembang di dalam ruang publik. Tapi apakah itu menunjukkan Islam Indonesia sebagai Islamisme?

Islam menurut Tibi memang "...menyiratkan nilai-nilai politis tertentu namun tidak mensyaratkan suatu tata pemerintahan khusus."[10] Mungkin keyakinan yang sama muncul di benak para ulama pendiri bangsa Indonesia ini yang bersepakat mendirikan NKRI, juga kemudian menghilangkan 7 kata (Ketuhanan Yang Maha Esa "dengan menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya") dari sila pertama Pancasila.

Ketujuh kata dari sila pertama ini sebenarnya menunjukkan adanya benih Islamisme pada benak pendiri bangsa. Ketujuh kata ini menunjukkan keinginan "syariatisasi Negara" (Ciri kelima). Walaupun kemudian dihapuskan, fakta kemunculannya menunjukkan benih Islamisme itu.

Sejarah mencatat, umat Islam Indonesia adalah pelaku utama pengusiran penjajah Belanda. Umat Islam Indonesia menyebut Belanda sebagai "penjajah" sekaligus "kafir", berteriak "merdeka" sekaligus "takbir". Pasangan kata "penjajah-kafir" dan "Merdeka-takbir" menunjukkan urusan politik yang diagamakan, nasionalisme-Islam, atau Islamisme. Setelah itu, muncul Islamisme terlembaga, yakni pada masa menjamurnya pendirian organisasi, muncul Majelis A'la Muslimin (pada tahun 1939) yang kemudian berganti menjadi Majelis Sura Muslimin Indonesia (MASYUMI) yang bertujuan menerapkan hukum Islam. MASYUMI patut mendapat catatan penting karena ia kemudian didiukung oleh ormas Islam berhaluan Ahlu Sunnah waljamaah seperti NU, Muhammadiah, Persis, Al-Islam, PUI, dan al-Wasliyah. Sejarah Indonesia juga mencatat munculnya Islamisme yang lain dalam pembentukan Negara Islam Indonesia (NII) di Jawa Barat, Sulawesi, dan Aceh.

Dengan demikian, Sejarah Umat Islam Indonesia pernah melahirkan tiga ideology gerakan Islam. *Pertama*, ideologi Negara Islam dari gerakan NII. *Kedua*, ideologi Islam sebagai dasar Negara, seperti pada pengusulan 7 kata dalam sidang konstituante. *Ketiga*, konsep penerapan hukum Islam dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat, dan bernegara sebagaimana tujuan Masyumi. Ketiga ideologi Islamisme ini memang selama ini tidak muncul di permukaan, namun seperti hasrat yang tertekan ia kemudian muncul secara tak terduga oleh sebab tertentu. Akhir-akhir ini ideologi Islamisme itu muncul kembali di tengah keyakinan-massa akan "kegagalan Negara" dalam melaksanakan amanat umat Islam.

*

Apa penyebab kemunculan Islamisme ini?

Tibi menulis bahwa "krisis Islam modern diperburuk oleh kesulitan menghadapi modernitas dan juga oleh krisis pembangunan yang terkait dengan modernisasi dunia Arab yang tak berhasil." Kesengsaraan ini yang dalam pandangan kelompok Islami disebabkan oleh Barat, dan pemain utama di balik Barat –dalam perkiraan kelompok ini—adalah Yahudi, kemudian jawaban untuk segala krisis ini adalah kembali pada akar; Yang Suci, dan pendirian tatanan baru dunia berdasarkan daulah Islam.

Modernisasi juga dianggap tidak berhasil di Indonesia, bahkan dalam dunia pemikiran sudah lama diragukan seperti oleh kalangan kaum Posmodern. Saat modernism gagal membuktikan janjinya mengenai dunia yang lebih baik dengan rasionalisme --"tanpa agama", kemunculan Islamisme dapat dianggap sebagai fenomena protes atas modernisme –seperti

[10] Bassam Tibi, Islam dan Islamisme, hlm. 1.

postmodernisme[11]. Islamisme bisa disebut bukan anak dari Islam, namun dari kegagalan modernisme.

Di sini dapat dikemukakan adanya kesamaan antara Islamisme (atau fundamentalisme) dengan Postmodernisme. Keduanya merupakan reaksi terhadap modernitas, keduanya sama-sama menegaskan adanya dimensi schyofrenia[12] dalam kehidupan kontemporer dan saling menggambarkan dunia yang ditandai oleh disjungsi dan diskontonuitas. Malcolm Bull dalam "Who was the First to Make A Dact with the Devil" mengemukakan bahwa postmodernisme dengan fundamantalisme memiliki kerangka rujukan global dan kewaspadaan terhadap krisis yang sama, suatu hubungan mendua terhadap modernitas di mana tidak satupun menyangkal keberadaan modernitas ataupun menginginkan langkah kembali ke masa lalu; keduanya melakukan penyesuaian ulang yang selektif terhadap masa lalu. Akbar S Ahmed [13]menegaskan model gerakan seperti Islamisme ini merupakan "usaha untuk mengetahui bagaimana hidup dalam dunia yang penuh dengan keraguan radikal", yang lahir –merujuk Falk—dari "perasaan bahwa monderisme tidak lagi bisa memberikan dasar bagi keberlangsungan hidup species dan makna manusia".[14]

Untuk itu, mengutip L Euben[15], gejala Islamisme ini dapat dianggap sebagai "Usaha untuk sekaligus memusnahkan, melampaui, memelihara, danmerubah modernitas". Perspektif fenomena Islamisme bagi Euben dapat dilihat sebagai aufhebung dialektis dari modernitas, dan bukan negasi a priori terhadapnya. Pada sisi lain dapat dikemukakan bahwa kaum Islamisme dan kaum postmodern juga sedang menekankan sisi gelap rasionalisme dan bersitegas bahwa kita harus menelaah apa yang diabaikan oleh visi pasca pencerahan mengenai modernitas. ISlamisme dapat disebut sebagai "interupsi" mengenai perlunya "fondasionalisme baru" untuk hidup layak di tengah fragmentasi pengetahuan yang merupakan ciri dunia kontemporer.

*

Bagi Tibi, solusi konflik Islam dan Islamisme ini adalah sekularisasi[16], yang bisa berarti bahwa ciri pertama Islamisme harus ditinggalkan. Tibi kemudian berharap bahwa Islam sipil

---

[11]Gagasan ini berseberangan dengan Tibbi yangdalam "Culture and Knowledge" menyatakan "Kerinduan fundamentalis akan yang absolute memperkenalkan konsep absolutism dalam pengetahuan manusia, dan tentunya bukan merupakan ide postmodernisme".

[12] Merujuk Felix Gauttari dalam *Chaosophy*, hal. 87, Skixofrenia bukanlah suatu patologi yang harus disembuhkan. Sebaliknya "Orang skizofrenik mempunyai efek mencerahkan bagi anda . dia menempati posisi "pengamat"... sedangkan orang-orang yang membeku dalam logika, sintaks, dan kepentingan mereka adalah yang buta"

[13] Ahmed, Postmondernisme and Islam, hal. 13

[14] Falk, Religion and Politics, hal, 380

[15] L Euben, *Enemy in the Mirror*, Hal. 306

[16] Sekularisme selalu dipandang secara simplistis. Sekularisme juga seringkali dianggap sebagai kosakata yang pejoratif, karena berusaha memisahkan agama dari kekuasaan negara. Dalam pandangan Soroush, sekularisme dalam bidang politik adalah satu bentuk pemerintahan yang menerima kritik, diperiksa dan disesuaikan. Dengan demikian pemerintahan yang sekuler dapat didefinisikan sebagai pemerintahan yang tidak memiliki nilai dan aturan-aturan yang berada di luar penilaian manusia dan verifikasi serta tidak ada protokol, status, posisi atau ordonansi yang tidak diawasi public. Berkaitan dengan bersatu atau berpisahnya agama dan negara Soroush melihat banyak kemungkinan yang terjadi. Semuanya tergantung bagaimana keduanya dipahami. Soroush mengatakan "*Naturally, when politics is desacralized (that is, when it becomes rational and scientific) while religion remains sacred, the two are separated. This is the meaning of and the reason for the separation of religion and state in secular societies.*"[dalam *Reason, Freedom And Democracy in Islam*, hal. 60] Namun, keduanya bisa juga duduk berdampingan dengan syarat bahwa politik dipadukan dengan agama saat pemahaman non sakral tentang politik dipadukan dengan pemahaman non sakral tentang agama. Inilah sebenarnya makna dari sekularisme yang seringkali dilupakan, karena seringkali ada salah pengertian dalam memahami sakralitas agama dan profanitas politik

akan menjadi alternatif dari merebaknya gagasan Islamisme[17]. Ihwal Islam Sipil ini Tibi menyebut Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki tradisi Islam sipil, walaupun tidak pernah mampu memengaruhi pemikiran di dunia Arab[18]. Robert Hefner kemudian mengelaborasi Civil Islam di Indonesia ini. Tentang Islam Civil ini, Hefner mengemukakan: "Sembari mengafirmasi legitimasi agama dalam kehidupan publik, Islam sipil menolak khayalan negara Islam dengan mengakui bahwa formula untuk memfusikan otoritas agama dan negara ini mengabaikan pelajaran dari sejarah Islam itu sendiri.[19]"Demokrasi, kata Hefner tidak akan bisa berjalan melalui masyarakat sipil dan budaya kewargaan saja. "Masyarakat sipil yang sehat mensyaratkan negara yang beradab." Di Indonesia, negara model demikian akan bisa bekerja dengan kebesaran warga serta humanitarianisme Islam sipil.[20]

Pengusul solusi yang lain, pada tahun 2007, adalah Asef Bayat, Profesor Sosiologi di Illionis University kelahiran Iran, yang menulis "*Making Islam Democratic: Social Movement and Post-Islamist Turn.*"[21]Bayat mengajukan istilah Pos-Islamisme, *As such, post-Islamism is not anti-Islamic, but rather reflects a tendency to resecularize religion. Predominantly, it is marked by a call to limit the political role of religion.*[22]". Bayat memberikan ilustrasi tentang sikap seorang Pos-Islamis dalam sebuah ungkapan, "kami tidak keberatan jika masjid dihancurkan untuk membuat jalan raya."[23]

Islam bagi Bayat harus menyadari bahwa permasalahan kehidupan membutuhkan jawaban yang dinamis, terus dirumuskan ulang, dan Islam tidak memiliki jawaban untuk seluruh masalah sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Seperti dikemukakan Abdul Karim Sourosh[24], Bayat, meyakini post-Islamisme dapat berkembang ketika Islam melakukan tiga gagasan perdamaian agama dan modernitas,. Yakni gagasa minimalis agama (*minimalist idea of religion*),[25] ide ekstra religius (*extra-religious idea*)[26], dan ide tentang hak-hak (*the idea of*

---

[17] Bassam Tibi, *Islam dan Islamisme*, Bab VIII.

[18] Bassam Tibi, *Islam dan Islamisme*, hlm. 139.

[19] Robert W. Hefner, *Civil Islam Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: ISAI, 2001), hlm. 46.

[20]Ibid.

[21] Buku ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Asef Bayat, *Pos-Islamisme*, (Yogyakarta: LKiS, 2011).

[22] Asef Bayat, "The Coming of a Post-Islamist Society," *Critique*, Fall, 1996, 45-46.

[23] Bayat mengutip kata-kata ini dari salah seorang diplomat luar negeri Iran di tahun 1995 yang namanya tidak ia sebutkan. Asef Bayat, "The Coming of a Post-Islamist Society,"*Critique*, Fall, 1996, 46.

[24] Abdolkarim Soroush, "Rationalist Traditions in Islam", makalah pada *International Conference Islam-Religion and Democracy*, Heidelberg Jerman, 2004.

[25]Gagasan ini didasarkan pada kemestian umat Islam menyesuaikan diri dengan keragaman umat beragama. Pada Negara modern, umat Islam adalah bagian dari warga Negara, bukan satu-satunya warga Negara. Tidak mungkin umat beragama akan menutup diri dan hanya akan bersosialisasi dengan umat seagama. Keragaman adalah *matters of fact*, dan tidak dapat menghindari itu. Interaksi kita dengan umat berbagai agama menjadi satu keniscayaan, padahal di saat yang sama kita juga harus memperteguh keimanan. Maka agama mencoba untuk menyesuaikan diri dengan arus modernitas tanpa harus menjadi terkalahkan oleh modernitas. Meskipun demikian, ini bukan berarti semua produk modernitas cocok dengan ajaran agama. Dan juga bukan berarti bahwa semua interpretasi agama terhadap modernitas bisa membuat keduanya bisa seiring berjalan.

[26] Umat beragama harus memahami bahwa banyak faktor dan ide yang berada di luar agamanya. Ide-ide tersebut juga harus dipahami, jika memang memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran keagamaan, yang akan melapangkan jalan menuju cita ideal sebuah agama. Upaya tersebut juga harus dibarengi dengan pengembangan terhadap pengetahuan (keagamaan) dan berjalan melampaui teks-teks skriptural. Hal inilah yang akan memberikan kita petunjuk bahwa pengetahuan keagamaan juga bersifat historis. Pengetahuan keagamaan bersifat historis karena pengetahuan manusia terhadap sisi luar dari agama juga bersifat historis. Dengan demikian, mengembangkan pemahaman keagamaan yang terbuka adalah jalan menuju ide ekstra religius

rights) dalam beragama[27]. Pengembangan bahasa hak (*language of rights*) ini menjadi sangat penting, karena dalam banyak agama bahasa yang sering diajukan adalah bahasa kewajiban

Ketiga gagasan Sourosh ini membuat Islam dapat kompatibel dengan semangat zaman, Post-Islamisme dianggap Bayat sebagai bukan hanya membuat Islam dapat kompatibel dengan modernitas, tetapi kelangsungan hidup sebuah agama sangat tergantung pada pencapaian kompatibilitas ini. Pos-Islamisme dalam pemikiran Bayat adalah upaya untuk meleburkan keagamaan dan hak, iman dan pembebasan, Islam dan kebebasan[28]. Penekanannya adalah pada hak daripada tugas dan kewajiban, menjunjung pluralitas menegaskan kesejarahan kitab suci dan selalu berorientasi pada masa depan. Jika Islamisme digambarkan sebagai peleburan agama dan tanggungjawab, Pos-Islamisme menekankan sikap keberagamaan dan Hak Asasi Manusia (HAM)[29].

Alternatif lain adalah memunculkan kekuatan khidmat dalam bidang social, budaya, ekonomi, dan pendidikan, seperti dilakukan Abdul Ghafar Khan di Pusthun dengan gerakan *Khudai Khidmatgaar*.

---

[27] Tentunya, hak yang dimaksud di sini bukan hak tanpa batas, tetapi hak yang berada dalam pagar-pagar normatif agama. Pengembangan bahasa hak (language of rights) ini menjadi sangat penting, karena dalam banyak agama bahasa yang sering diajukan adalah bahasa kewajiban. Sehingga apapun yang berada dibalik klaim agama, harus ditaati sebagai kewajiban terhadap agama, meski sebenarnya tidak ada kaitannya sama sekali dengan agama. Despotisme dengan demikian akan sangat mudah berkembang jika bahasa kewajiban tidak diimbangi dengan bahasa hak. Tuhan yang ada dalam kepercayaan umat Islam, tentu bukanlah Tuhan yang despotik. Karena, Tuhan yang despotik tidak mungkin dapat kita padukan dengan ide tentang hak. Tuhan yang kita pahami adalah Tuhan yang telah memberikan spirit kepada manusia untuk berjalan menuju keagunganNya melalui tanda-tanda yang Ia berikan. Jalan itulah yang kemudian berdiaspora menjadi banyak ragam. Dalam konteks inilah kita bisa mengembangkan ide tentang hak dalam beragama. Hak tersebut bisa kita tuntut sebagai jalan untuk mengharap ridlo Tuhan. Hak tersebut termasuk di dalamnya hak untuk berpikir, berkreasi, berbicara serta hak untuk berbeda pendapat. Dengan memahami hak dalam kerangka ini bukan berarti mengabaikan kewajiban. Tetapi, lebih dari itu, kewajiban itu sebenarnya bisa berdamai dengan hak, saat keduanya berada dalam skala yang proporsional.

[28] Bayat, Ibid., hlm. 20.

[29] Ibid.